Jurnal Administrasi Publik, Volume 2 No. 1 Thn. 2011

Pembiayaan Pendidikan di Sekolah Dasar Kota Bau-Bau Provinsi Sulawesi Tenggara

Manan Sailan

Staf Pengajar
Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi tentang gambaran: 1) implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Kota Bau-Bau, 2) peningkatan penerimaan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk biaya fisik sekolah, 3) peningkatan penerimaan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk biaya proses pembelajaran; dan 4) peningkatan penerimaan dana dari APBD untuk biaya kesejahteraan guru. Penelitian ini menggunakan pendekatan survai, dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, observasi, dan studi dokumentasi, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan di SD Kota Bau-Bau dalam hubungannya dengan kewenangan pemerintah membuat kebijakan ternyata cenderung lebih banyak menggunakan pendekatan "*top-down*"' daripada pendekatan "*bottom-up*". 2) penerimaan dana dari APBN untuk biaya fisik sekolah dalam tiga tahun terakhir rata-rata meningkat dan peningkatan itu masih kecil untuk memenuhi kebutuhan sekolah. 3) peningkatan penerimaan dana dari APBD untuk biaya proses pembelajaran dalam tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi dengan peningkatan yang masih kecil untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan proses pembelajaran. 4) penerimaan dana dari APBD untuk biaya kesejahteraan guru dalam tiga tahun terakhir rata-rata mengalami peningkatan yang masih kecil untuk memenuhi kebutuhan dasar guru.

Kata Kunci: Implementasi Pembiayaan Pendidikan, APBN, APBD.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak dasar sekaligus kewajiban dasar setiap warga Negara untuk dapat dicapai untuk dapat mewujudkan cita-cita pembangunan Negara. Sehingga Pemerintah wajib membiayai penyelenggaraannya sebagai-mana diatur dalam UUD 1945 Pasal 31 bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti, pendidikan dasar dan Pemerintah wajib membiayainya sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN serta 20 persen dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan Nasional. Meskipun negara telah memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN serta 20 persen dari APBD sehingga masyarakat dapat langsung merasakan akses dari pelaksanaan program perluasan dan

pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu dan bermanfaat, namun kenyataannya di Kota Bau-Bau sampai saat ini masih banyak warga yang belum mendapatkan kesempatan bersekolah hanya karena masalah biaya, mutu hasil pendidikan masih rendah, jumlah anak putus sekolah masih banyak, jumlah pendaftar sekolah menurun, angka melanjutkan sekolah menurun, dan meningkatnya Jumlah rata-rata angka pengangguran dini pada usia pendidikan dasar (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebut LAKIP Dinas Pendidikan Kota Bau-Bau Tahun 2006).

Untuk mengatasi kenyataan tersebut, Pemda Kota Bau – Bau memberi tugas dan fungsi kepada Dinas Pendidikan bidang Penyusunan Rencana Program sesuai Pasal 10 (d) Keputusan Walikota Bau-Bau Namur 175 Tahun 2003 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Bau-Bau untuk melakukan perencanaan pembiayaan pendidikan serta mempersiapkan lokasi biaya pendidikan dalam rneningkatkan sumber daya melalui pengembangan sumber daya manusia dengan sumber pendanaan untuk biaya pelaksanaannya dibebankan kepada APBD.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Implementasi Kebijakan Pendidikan

Menurut Ripley & Franklin (1982), Juanda (2004), dan Salusu (2002) dapat dirangkum, bahwa implementasi adalah kegiatan mencakup tindakan-tindakan atau tanpa tindakan-tindakan menyusul suatu keputusan administrasi dengan melibatkan berbagai aktor termasuk birokrat guna mencapai suatu tujuan, sasaran, dan program-program organisasi yang telah ditetapkan. Demikian halnya, pendapat dari Dunn (1981), Wibawa (1994), Lester dan Steward (2000), Van Meter dan Horn (1975), dan Wahab (1994) diungkapkan, bahwa Implementasi Kebijakan adalah tindakan-tindakan pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor khususnya birokarat, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama yang diarahkan untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan atau program-program.

Pendapat dari Jalal dan Supriadi (2001), Islamy (2002), Thoha (1992), dan Rakasasataya (1989) dapat dirangkum bahwa Kebijakan pendidikan adalah sejumlah keputusan yang dilakukan Pemerintah di bidang pendidikan dengan maksud untuk melakukan perubahan dan penyesuaian arah kebijakan pendidikan sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan keberagaman kebutuhan maupun keadaan daerah dan peserta didik serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat.

2. Implementasi Pembiayaan Pendidikan

Menurut Cohn (1975), Tan Mingat (1988), Fattah (2004), dan Jones (1985) dapat diidentifikasi. bahwa Implementasi Pernbiayaan Pendidikan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh lembaga atau organisasi pemerintah, swasta, dan masyarakat dalarn melakukan analisa tentang sumber-sumber pendanaan dan penggunaan biaya yang diperuntukan bagi pengeloaan pendidikan secara efisien untuk mencapai lebih banyak tujuan program yang telah ditetapkan. Karena makin efisien dana pada sistem pendidikan itu maka berkurang pula dana yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuannya.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan survei. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Bau-Bau tepatnya pada kantor Dinas Pendidikan, dengan sasaran unit penelitian adalah seluruh SD. Populasi penelitian ini adalah

seluruh SD di Kota Bau-Bau sebanyak 62 buah yang tersebar di: zona I (kawasan pusat pemerintahan) sebanyak 30 buah, zona II (kawasan lingkar tengah) sebanyak 10 buah, dan zona III (kawasan lingkar Iuar) sebanyak 22 buah. Responden adalah seluruh guru berstatus kepala sekolah di SD yang tersebar di tiga zona tersebut sebanyak 62 orang. Dengan sampel sebanyak 20 buah dari 32 persen populasi di mana Teknik pengambilan sampelnya dengan cara "*Cluster Random Sampling*". Sedangkan jumlah sampel responden guru berstatus kepala sekolah sebanyak 20 orang diambil secara Iangsung dari 20 buah sekolah dasar sampel.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan Pembiayaan Pendidikan

Pemerintah daerah dalam kewenangannya membuat kebijakan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 dalarn menetapkan mekanisme perumusan peraturan daerah dengan melibatkan pendekatan "*top-down*" dan "*bottom-up*" sekaligus, meskipun kecenderungannya masih lebih banyak menggunakan pendekatan "*top-down*" dengan alasan bahwa: 1) pendekatan "*top-down*" membuat proses penyusunan kebijakan menjadi lebih cepat dan lebih efisien, 2) pendekatan "*top-down*" membantu pernerintah daerah mempercepat menyelaraskan daerah, 3) pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan daerah, dan 4) rendahnya tawar menawar masyarakat untuk mempengaruhi para pengambil kebijakan karena kemampuan disetiap sekolah masih dinilai rendah. (LAKIP Dinas Pendidikan Kota Bau-Bau Tahun 2006).

Hasil penelitian ini relevan dengan teori yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) bahwa ada lima variabel yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, yaitu: 1) kondisi sasaran kebijakan, 2) kondisi Sumber Daya Manusia, 3) koordinasi antar instansi, 4) karakteristik agen pelaksana, dan 5) kondisi ekonomi dan politik. Bahkan dalam hasil penelitian ini ditemukan adanya 1 (satu) variabel berpengaruh yakni dukungan karakteristik nilai-nilai budaya lokal yang tumbuh dan terpelihara sebagai penuntun tingkah laku yang mewarnai setiap pembuatan kebijakan sekaligus implementasinya.

2. Kebijakan Penerimaan Dana Anggaran APBN pada aspek fasilitas Sekolah

Mendukung dari ketersediaan fisik sekolah, tentunya diharapkan bantuan dana anggaran pemerintah pusat maupun daerah. Berdasarkan dukungan dana anggaran tersebut, tentunya akan mempermudah setiap sekolah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini yang terjadi pada SD Kota Bau-Bau yang telah menerima dana dari APBN untuk pembiayaan aspek fisik Sekolah di SD Kota Bau-Bau dalarn tiga tahun terakhir rata-rata sebesar 12 persen pertahun. Meskipun penerimaan mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun jumlahnya masih relatif kecil untuk memenuhi kebutuhan sekolah.

Hal ini menunjukkan menunjukkan kemajuan cukup menggembirakan karena pada umumnya gedungnya permanen bahkan ada yang bertingkat, ruangan kelas layak untuk berlangsungnya proses pernbelajaran. Meskipun demikian masih ada komponen-komponen lain seperti ruangan perpustakaan dan ruangan laboratorium penerimaan dananya masih relatif rendah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Oleh karena itu, untuk menyediakan sarana lainnya tentunya diharapkan kepada pemerintah untuk terus membantu dalam penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dimasa yang akan datang.

3. Kebijakan Penerimaan Dana Anggaran APBD dalam Proses Pembelajaran

Adanya bantuan pemerintah tentunya akan berdampak dari berbagai aspek dalam keberhasilan pendidikan, baik dilihat dari input peserta didik, proses pembelajaran, dan luaran peserta didik. Salah satu hal yang sangat berperan dari berbagai tahapan tersebut adalah pemerintah atau *stakeholder* yang mampu mendukung keberhasilan pendidikan. Seperti halnya di Dinas Pendidikan Kota Bau-Bau yang menyediakan sumber daya manusia (SDM) yang memadai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawabnya masing-masing. Terdapat pula hubungan kerjasama secara baik antar Dinas Pendidikan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Badan Pengawasan Daerah (BAWASDA), bagian terkait pada pemerintah kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Camat, Lurah, dan masyarakat serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) peduli pendidikan dan dewan pendidikan dalam implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan sehingga visi-misi pendidikan Kota Bau-Bau dapat terwujudkan. Dengan keterlibatan antar instansi tersebut, maka akan mempermudah dalam dalam melakukan berbagai kegiatan, seperti: 1) mengadakan kunjungan langsung ke sekolah-sekolah untuk memberikan masukan-masukan kepada kepala sekolah mengenai pembiayaan, 2) menciptakan suatu iklim yang kondusif sehingga memungkinkan kepala sekolah berdiskusi dengan koleganya (kepala sekolah lain) untuk memengatasi dan menyelesaikan permasalahan terkait dengan pembiayaan pendidikan, dan 3) memberikan perhatian dan jalan keluar atas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh kepala sekolah dalam melaksanakan tugasnya.

Selain dari pada itu, maka terdapat pula berbagai dukungan lainnya adalah, seperti:

a. Dukungan karakteristik nilai-nilai budaya lokal yang tumbuh dan terpelihara sebagai penuntun tingkah laku dan mental yang mewarnai setiap perbuatan kebijakan dan implementasinya oleh agen pelaksana kebijakan.
b. Pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun sehingga dapat menunjang pelaksanaan program pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh warga.
c. Adanya partisipasi politik masyarakat yang cukup tinggi dalam keikutsertaannya memilih pemimpin mereka yang secara langsung dapat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan.

Berdasarkan informasi tersebut maka memberikan gambaran bahwa peningkatan penerimaan dana dari APBD untuk pembiayaan proses pembelajaran di sekolah dasar Kota Bau-Bau dalam tiga tahun terakhir berfluktuasi di mana pada tahun 2007/2008 mengalami peningkatan sebesar 11,49 persen dan pada tahun 2008/2009 mengalami penurunan sebesar 31,32 persen. Sedangkan mengenai jumlah yang dana anggaran diterima masih relatif kecil untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan proses pembelajaran.

Kebijakan Penerimaan Dana Anggaran APBD pada aspek Kesejahteraan Guru

Salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka memberikan kesejahteraan kepada tenaga pendidik atau guru maka dibutuhkan suatu cara untuk mewujudkannya. salah satu caranya ialah dengan meningkatkan penerimaan Dana dari APBD di setiap sekolah guna menunjang kesejahteraan guru. Demikian halnya di Sekolah Dasar Kota Bau-Bau, dalam tiga tahun terakhir mendapatkan rata-rata anggaran APBD sebesar 36,76 persen pertahun. Meskipun penerimaan mengalarni peningkatan dari tahun ke

tahun namun jumlahnya masih relatif kecil untuk memenuhi kebutuhan dasar guru.

Hasil penelitian ini terkait dengan kebijakan penerimaan dana baik dari anggaran APBN maupun APBD memberikan gambaran bahwa teori yang dikembangkan oleh Jones (1985) dalam pembiayaan pendidikan yang paling utama adalah berapa besar uang yang harus diterima dan harus dibelanjakan, dari mana uang diperoleh, dan kepada siapa uang harus dibelanjakan. Teori ini menuntut adanya transparansi dan efisiensi pembiayaan dan penggunaan dana untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Penelitian ini juga relevan dengan teori yang dikembangkan Cohn (1975) bahwa suatu lembaga atau organisasi pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam melakukan analisa tentang sumber-sumber pendanaan dan penggunaan biaya yang diperuntukkan bagi pengelolaan pendidikan harus secara efisien untuk mencapai lebih banyak tujuan program yang telah ditetapkan. Karena makin efisien dana pada sistem pendidikan itu maka berkurang pula dana yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuannya.

PENUTUP

Berdasarkan penelitian ini memberikan gambaran Implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan SD Kota Bau-Bau dalam membuat kebijakan, pemerintah cenderung menggunakan pendekatan "*top-down*" daripada pendekatan "*bottom-up*". Sedangkan dalam penerimaan alokasi dana dari APBN untuk pembiayaan aspek fisik sekolah dalam tiga tahun terakhir rata-rata meningkat meskipun masih terdapat beberapa komponen penting yang belum mendapatkan alokasi dana untk pembiayaannya. Lebih lanjut bahwa penerimaan alokasi dana dari APBD untuk pembiayaan aspek pembelajaran dalam tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi dan alokasi dana masih relatif kecil, meskipun demikian, akan tetapi masih memenuhi kebutuhan dalam proses pembelajaran. Sedangkan dalam Penerimaan alokasi dana daril APBD untuk pembiayaan aspek kesejahteraan guru juga mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Meskipun demikian peningkatan tersebut masih kecil untuk memenuhi kebutuhan dasar guru.

DAFTAR PUSTAKA

Fattah, Nanang. 2004. Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Islamy, Irfan M. 2002. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Jalal, Fasli dan Supriadi, Dedi. 2001. Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah. Yogyakarta: Adi Cita.

Jones. 1985. School Finance: Technique and Social Policy. London: Collier Macmillan Pub.

Lester, James P. and Joseph Stewart. 2000. Public Policy; *An Evolutionary Aproach*. Australia: Wadsworth, Secon Edition.

Mingat, A. dan Tan JP. 1988. Analytical Tools for Sector Work in Education. A World Bank Publication,

Thoha. 1995. Kepemimpinan Dalam Manajemen. Jakarta: Rajawali.

Van meter, Donalds and Carl E.Vah Hornd. 1975. The Policy implementation Process: *A Conceptual Framework*. Administration and Society. Vol. 6. No.4, February.

Wagiman. 1993. Pengelolaan Biaya Pendidikan dalam Menunjang Pelaksanaan Program Pengajaran di SD Negeri dalam Kodya Pakan Baru. Tesis tidak diterbitkan. Bandung: PPS IKIP Bandung.

Wahab, Solihin Abdul. 2004. Analisis Kebijaksanaan: Dari Reformasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Wibawa, Samodra, Dkk.1994. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: Rajawali Pers.

Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Walikota Bau-Bau Nomor 175 tahun 2003 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Bau-Bau.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan Daerah Dinas Pendidikan Kota Bau-Bau

Undang-Undang Dasar 1945 tentang Pembukaan UUD 1945.